

PROSIDING
SARASEHAN NASIONAL
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PM) KEDUA
PERGURUAN TINGGI SE INDONESIA
BOGOR, 2 MARET 1991



IPB20010791



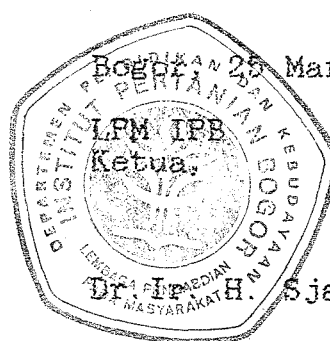
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
LEMBAGA PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah berdasarkan maksud dan tujuannya, Sarasehan Nasional Pengabdian pada Masyarakat (kedua) yang telah dihadiri 39 Kelembagaan Pengabdian pada Masyarakat dari 22 Perguruan Tinggi Negeri, 12 dari Perguruan Tinggi Swasta, dan lima dari Kopertis, telah berhasil mendiskusikan dan merumuskan struktur keorganisasian, mekanisme kerja, dan program-program pengabdian pada masyarakat dalam memasuki pembangunan jangka panjang tahap kedua.

Rumusan hasil sarasehan yang termuat dalam laporan ini diharapkan dapat dipakai sebagai masukan dalam penyusunan Statuta Perguruan Tinggi maupun penyusunan petunjuk operasional pelaksanaan PPM oleh Perguruan Tinggi.

Kepada berbagai pihak yang telah ikut mendukung pelaksanaan Sarasehan ini diucapkan terimakasih banyak.



Bogor, 25 Maret 1991

Dr. Ir. H. Sjafri Mangkuprawira

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
I. LATAR BELAKANG, TUJUAN, DAN TOPIK-TOPIK SARASEHAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	2
1.3. Topik-Topik Sarasehan	2
II. PERUMUSAN HASIL SARASEHAN	
2.1. Kondisi Faktual	3
2.2. Struktur Organisasi.....	5
2.3. Mekanisme Kerja	6
2.4. Program Pengabdian pada Masyarakat.....	8
2.5. Khusus.....	12

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Beberapa Alternatif Bentuk Struktur Organisasi Lembaga Pengabdian pada Masyarakat	13
1.1. Usulan Universitas Lambung Mangkurat.....	13
1.2. Usulan IKIP Bandung	14
1.3. Usulan Universitas Pajajaran	15
1.4. Usulan Universitas Hassanuddin	16
1.5. Usulan Univ. Diponegoro	17
2. Daftar Nama Peserta	18
3. Jadwal Acara.....	20
4. Sambutan Rektor IFB.....	21
5. Topik-Topik Makalah	23

I. LATAR BELAKANG, TUJUAN DAN TOPIK-TOPIK SARASEHAN

1.1. Latar Belakang

Presiden Republik Indonesia telah mengundang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Sebagai Pelaksanaan Undang-Undang tersebut telah pula dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1990 khususnya yang menyangkut sistem Perguruan Tinggi.

Lembaga Pengabdian pada Masyarakat (LPM) Institut Pertanian Bogor yang memprakarsai Sarasehan Komunikasi Pengabdian pada Masyarakat Perguruan Tinggi Negeri se Indonesia yang I pada 6 Februari 1990 tahun yang lalu dimana pada waktu itu telah dihasilkan masukan penting tentang status kelembagaan LPM, pada tahun 1991 ini telah pula memprakarsai Sarasehan Komunikasi PPM PT se Indonesia yang ke II.

Sarasehan yang ke II lebih mengkhususkan pembahasan pada:

1) Bagaimana bentuk struktur keorganisasian PPM, 2) Bagaimana mekanisme kerja di dalam kelembagaan PPM dan dengan unit-unit dari dalam PT dan, 3) Program-program apa saja yang dianggap relevan untuk periode pembangunan jangka panjang tahap kedua.

1.2. Tujuan

Tujuan Sarasehan Komunikasi PPM yang ke dua adalah untuk merumuskan:

1.2.1. Bentuk struktur keorganisasian PPM yang dianggap layak yang disesuaikan dengan peranti lunak, peranti keras dengan program Perguruan Tinggi itu sendiri, khususnya bagi PT yang selama ini kelembagaan PPM-nya masih berstatus Pusat dan Balai.

1.2.2. Mekanisme kerja di dalam kelembagaan PPM dan dengan unit-unit lain dalam PT termasuk-pengesaan kegiatan PPM untuk nilai KUM dosen.

1.2.3. Program-program PPM baik program jangka pendek maupun jangka panjang yang dianggap relevan terutama untuk memasuki masa pembangunan jangka panjang tahap kedua.

1.3. Topik-Topik

Untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan di atas, maka dalam sarasehan ini terdapat dua topik yang dibahas, yaitu:

1) Struktur organisasi dan mekanisme kerja kelembagaan pengabdian pada masyarakat, masing-masing oleh:

1. Dr.H. Djudju Sudjana, M.Ed. (Ketua LPM IKIP Bandung)
2. Drs. Yonihanto Wasimun, MS. (Kepala Pusat PPM Universitas Lambung Mangkurat)

2) Program-program pengabdian pada masyarakat dalam memasuki pembangunan jangka panjang tahap kedua, masing-masing oleh:

1. Prof. Dr. Bahrein T. Sugihen (Kepala Pusat PPM UNSYIAH Banda Aceh)
2. Ir. Nisyamburi (Ketua LPM Univ. Diponegoro)
3. Prof. Dr. Wahyu Karhiwikarta (Ketua LPM UNPAD Bandung)

II. PERUMUSAN HASIL SARASEHAN

2.1 KONDISI FAKTUAL

1. Kondisi peranti keras dan lunak untuk melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat (PM) di seluruh perguruan tinggi relatif masih dalam keadaan beragam baik ditinjau dari aspek fasilitas, tenaga ahli, kelembagaan, maupun sumberdaya dana.
2. Struktur organisasi Kelembagaan Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) yang beragam terkait dengan jenis dan volume kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan masing-masing perguruan tinggi.
3. Komunikasi dan koordinasi program pengabdian kepada masyarakat antara LPM dan unit-unit organisasi di suatu perguruan tinggi belum sepenuhnya maksimal. Kondisi itu dicerminkan oleh masih adanya :
 - a. Kelembagaan PM yang belum berfungsi sepenuhnya sebagai pengendali dan penilai kegiatan PM unit lain;
 - b. Kebijakan pelaksanaan PM dengan satu pintu yang belum terwujud dengan efektif;
 - c. Sistem pelaporan kegiatan PM yang belum lancar dan belum terpusat.
4. Sistem pemberian insentif bagi staf pengajar dan pengurus kelembagaan PM belum mendorong mereka untuk memaksimalkan kegiatannya dalam darma PM. Kondisi itu dicerminkan oleh:
 - a. masih kompleksnya aspek-aspek yang dinilai dalam menetapkan penghargaan untuk KUM

- b. masih rendahnya angka kredit KUM untuk kegiatan PM dari staf pengajar (tidak merangsang)
 - c. dana dan sumber dana yang masih terbatas
5. Koordinasi program PM yang masih lemah bukan saja terjadi di antara unit-unit yang ada di dalam perguruan tinggi tetapi juga terjadi dengan perguruan tinggi dan lembaga -lembaga lain di luar perguruan tinggi tersebut.
 6. Belum semua perguruan tinggi telah merumuskan mekanisme kerja dan agenda program PM dalam bentuk tertulis yang disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dan perkembangan-perkembangan yang baru.

2.2 STRUKTUR ORGANISASI

1. Dalam menyusun struktur organisasi LPM perlu diperhatikan dimensi-dimensi sebagai berikut:
 - a. ketentuan-ketentuan yang berlaku: Undang-Undang No. 2 1989, PP No. 30 tahun 1990 dan statuta masing-masing perguruan tinggi.
 - b. asas fungsional yaitu bagaimana LPM sebagai koordinator PM harus mampu menjamin kelancaran penyelenggaraan fungsi perguruan tinggi dalam darma PM.
 - c. asas manajerial yaitu bagaimana LPM harus mampu menerapkan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan penilaian secara efektif dan efisien.
2. Struktur organisasi seyogianya mencerminkan fungsi-fungsi dari setiap subsistem yang terkait pada perumusan kebijaksa-

naan dan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta pengawasan. Selain itu hendaknya menggambarkan mekanisme kerja antarunit organisasi di perguruan tinggi yang ada secara terkoordinasi dengan baik.

3. Dalam merumuskan struktur Organisasi kelembagaan PM perlu diperhatikan aspek-aspek fleksibilitas, keterbukaan dan otonomi perguruan tinggi.
4. Struktur organisasi di bawah ketua LPM mempunyai fungsi dan tugas yang setara dengan pusat-pusat yang ada di dalam perguruan tinggi itu sendiri. Sebutan-sebutan struktur tersebut dapat berupa : Ketua/Kepala Kelompok Program, Ketua/Kepala Bidang, Ketua/Kepala Kelompok Pengabdian, Ketua/Kepala Satuan Tugas, dan Ketua/Kepala Unit Program. Ketua/Kepala yang dibantu seorang Sekretaris itu diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada ketua LPM.
5. Komisi Pertimbangan dapat dibentuk sesuai dengan keperluan dan kemampuan perguruan tinggi yang bersangkutan
6. Struktur Ketua dan Sekretaris LPM berada dalam satu kotak untuk menghindari salah pengertian dari fungsi sekretaris.
7. Untuk terwujudnya keterpaduan diantara pelaku program tri darma maka Ketua LPM "harus" menjadi anggota Senat Perguruan Tinggi.

2.3. MEKANISME KERJA

1. Seperti halnya dalam menyusun Struktur Organisasi LPM maka dalam mekanisme kerja PM perlu memperhatikan aspek-aspek fleksibilitas, keterbukaan dan otonomi perguruan tinggi.

2. Mekanisme kerja program PM harus dilihat dari tiga sisi/jalur :
 - a. Jalur koordinasi di dalam struktur perguruan tinggi
 - b. Jalur LPM sebagai unsur pelaksana PM.
 - c. Jalur LPM sebagai koordinator program PM antara LPM dengan Fakultas, Pusat Penelitian, Jurusan dan Laboratorium.
3. Mekanisme kerja program PM dalam suatu perguruan tinggi seyogianya diterapkan dengan kebijaksanaan satu pintu tanpa harus menimbulkan arus birokrasi yang tidak efisien.
4. Sesuai dengan kedudukannya seperti tercantum dalam PP Nomor 30 tahun 1980 maka fungsi LPM dalam penerapan mekanisme kerja adalah sebagai berikut :
 - a. menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yaitu melakukan perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pengembangan program pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan di tingkat perguruan tinggi.
 - b. mengkoordinasi penyelenggaraan program PM yang dilaksanakan oleh fakultas, pusat penelitian, unit SATGAS, jurusan, laboratorium dan tenaga akademik baik kelompok maupun perorangan.
 - c. melakukan kerjasama atas nama pimpinan perguruan tinggi bersangkutan mengenai program PM dengan perguruan tinggi lain dan badan-badan lainnya baik di dalam maupun di luar negeri.

- d. melaksanakan pembinaan dan pengembangan kerjasama dengan unit-unit lain dalam perguruan tinggi yang bersangkutan.
 - e. menyelenggarakan seminar dan penyebarluasan hasil-hasil pengabdian pada masyarakat.
5. Agar mekanisme kerja kelembagaan PM dapat berjalan baik maka diperlukan adanya pedoman pokok, uraian kerja dan agenda pengabdian kepada masyarakat pada tiap perguruan tinggi.
 6. Untuk menggairahkan dan memberi penghargaan yang layak kepada tenaga akademik dalam melaksanakan kegiatan PM, maka besarnya KUM yang sekarang 0 - 15 %, sebaiknya diubah menjadi minimal 10 - 15 %.
 7. Untuk meningkatkan program PM maka hendaknya LPM mampu dan aktif mencari sumber-sumber dana inkonvensional dalam rangka mewujudkan kemandirian.

Catatan: Beberapa alternatif bentuk struktur organisasi LPM disajikan pada Lampiran 1.

2.4. PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. Strategi Dasar

1. *Konsolidasi*

Konsolidasi organisasi dimaksudkan sebagai usaha penguatan sendi-sendi dan mekanisme organisasi seperti pedoman pokok pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, personalia, administrasi, tatakerja dan anggaran agar mencapai hasil dan dayaguna yang optimal. Untuk itu konsolidasi dapat dilakukan

ke dalam dan ke luar secara berkesinambungan dan berencana.

2. *Integrasi*

Integrasi dimaksudkan sebagai suatu usaha yang bertujuan agar semua unsur Unit organisasi dapat mengetahui dan menghayati tujuan, arah dan sasaran yang hendak dicapai. Dengan demikian, sejak awal semua unit pengabdian kepada masyarakat sudah harus diserasikan dalam melihat pandangan kedepan, menelaah tujuan dan sasaran pengabdian kepada masyarakat serta mengolah kemampuan sumber potensi yang ada. Selain itu tiap program pengabdian kepada masyarakat haruslah terintegrasi dengan program kelompok sasaran pengabdian kepada masyarakat, program pembangunan nasional dan juga dengan dharma pendidikan dan penelitian. Karena itulah upaya memasyarakatkan dharma pengabdian kepada masyarakat di lingkungan perguruan tinggi tidaklah semata-mata dilakukan LPM tetapi juga dilakukan oleh fakultas, pusat penelitian dan jurusan serta laboratorium. Selain itu proses diseminasi hasil penelitian perlu terus ditingkatkan bagi keperluan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan perguruan tinggi oleh unit-unit.

3. *Pengembangan*

Bobot rencana dasar program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat semestinya lebih berorientasi pada pencapaian tujuan dan sasaran serta pengembangannya disamping tugas-tugas rutin. Untuk itu produk-produk penelitian yang dilakukan perguruan tinggi dan instansi lain perlu dimanfaatkan

seoptimal mungkin dalam pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat. Dipandang dari dimensi siklus waktu dan masalah, LPM dan unit-unit lainnya secara mantap terus-menerus harus mencari dan memasyarakatkan gagasan atau konsep pembangunan kepada berbagai kelompok sasaran. Jadi LPM tidak pasif menunggu permintaan.

B. Beberapa faktor yang perlu diperhatikan

1. Sebagai suatu kesatuan proses dalam pelaksanaan tri dharma, maka LPM dapat mengadakan penelitian (kaji tindak) yang hasil penelitiannya dipakai sebagai dasar dalam merumuskan masalah, menentukan halayak sasaran pengabdian kepada masyarakat dan merumuskan strategi program PM. Dengan demikian penelitian yang dilakukan oleh LPM tidaklah berhenti hanya untuk penelitian saja tetapi seharusnya terkait atau berkelanjutan dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
2. Di dalam menyusun Program PM harus diperhatikan faktor-faktor internal dan external.
 - a. Faktor internal lebih menitikberatkan pada pengaturan institusi masing-masing Perguruan Tinggi, termasuk kemampuan dalam penyediaan sumberdaya manusia dan dana.
 - b. Faktor external tiada lain adalah faktor faktor-faktor yang berkembang di masyarakat dalam aspek-aspek ipoleksosbud.
3. Sebaiknya program PM itu memiliki karakteristik sebagai berikut : (1) harus melihat kecenderungan-kecenderungan di masa depan; (2) diarahkan pada masalah-masalah strategis

masyarakat dan pembangunan; (3) diarahkan pada dampak yang nyata dan meluas dan (4) menunjang keberhasilan program pembangunan nasional.

4. Di dalam menyusun program PM perlu diperhatikan faktor-faktor fleksibilitas, keterbukaan dan otonomi perguruan tinggi.
5. Untuk tercapainya pelaksanaan program PM di perguruan tinggi diperlukan suatu program payung dengan koordinasi LPM.
6. Khalayak sasaran program PM tidak dibatasi pada masyarakat pedesaan saja tetapi juga masyarakat di perkotaan.
7. Program-program PM khususnya yang menyangkut upaya pengkajian dan pengembangan hendaknya berorientasi waktu yang cukup panjang (multi years), dan terencana dengan baik. Untuk itu dibutuhkan dana cukup besar antara lain dari Depdikbud c.q Ditbinlitabmas seperti yang terjadi pada Lembaga Penelitian serta dari pihak-pihak swasta.

C. Jenis Program

Antara lain:

- a. Pengembangan sumberdaya manusia (pendidikan, pelatihan ketrampilan).
- b. Pengembangan, penerapan dan penyebarluasan teknologi tepatguna.
- c. Pengembangan dan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan.
- d. Program pengembangan wilayah khususnya di wilayah lahan kering dan transmigrasi serta wilayah terisolasi.
- e. Penyebarluasan informasi hasil PM pada masyarakat.

- f. Pelayanan profesional pada masyarakat.
- g. Pengembangan ekonomi desa khususnya Koperasi Unit Desa
- h. Pengembangan kesadaran politik, budaya dan hukum
- i. Pengembangan program Pasca KKN
- j. Pengembangan masyarakat di daerah kumuh perkotaan
- k. Perencanaan pembangunan wilayah.

2.5. K H U S U S

Atas usul IPB maka telah disepakati secara bulat bahwa:

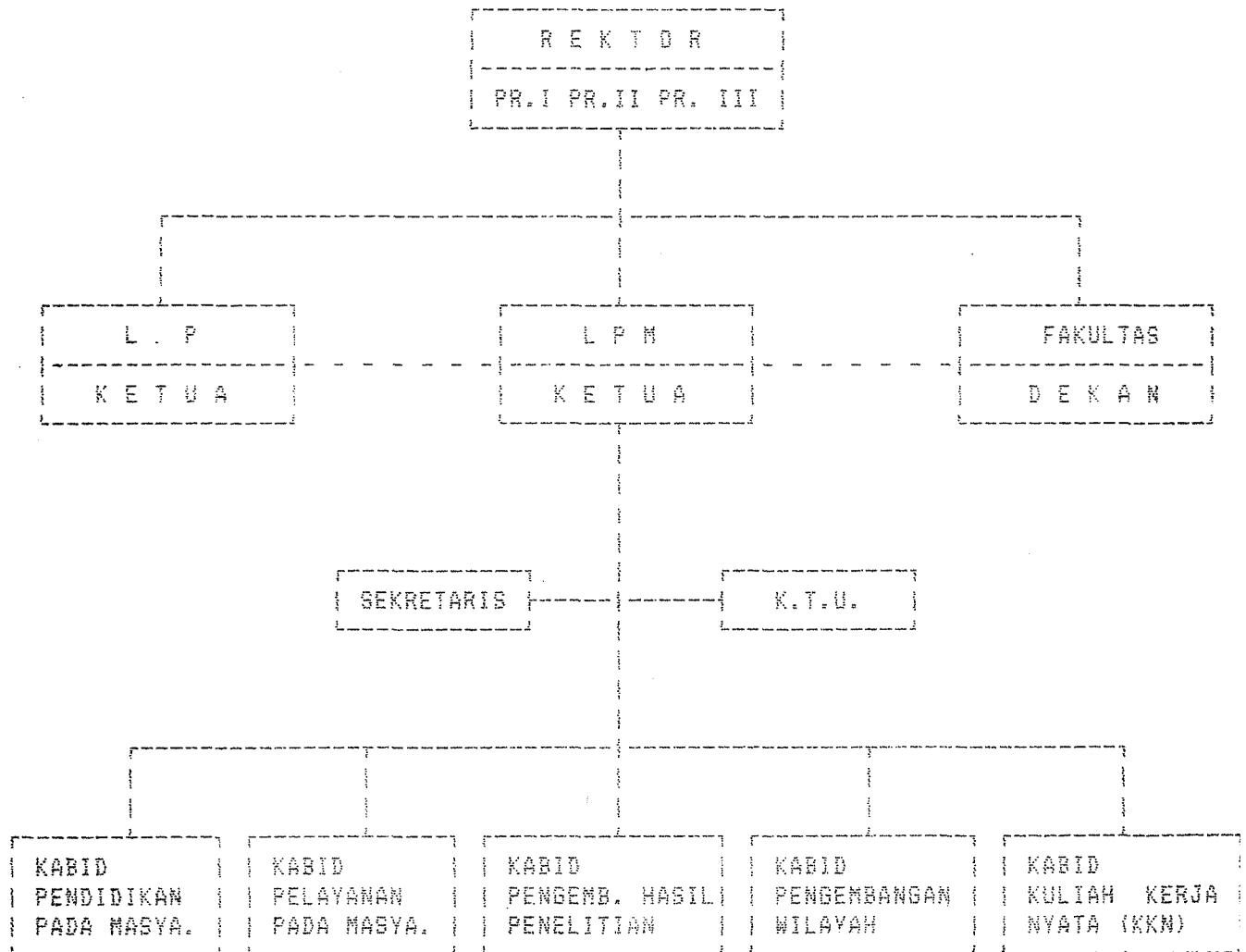
1. Sarasehan Nasional PM yang berikutnya dilaksanakan secara bergilir di antara perguruan tinggi.
2. Sarasehan Nasional PM yang ketiga akan diadakan di UNDIP Semarang pada tahun 1982.

Perumus:

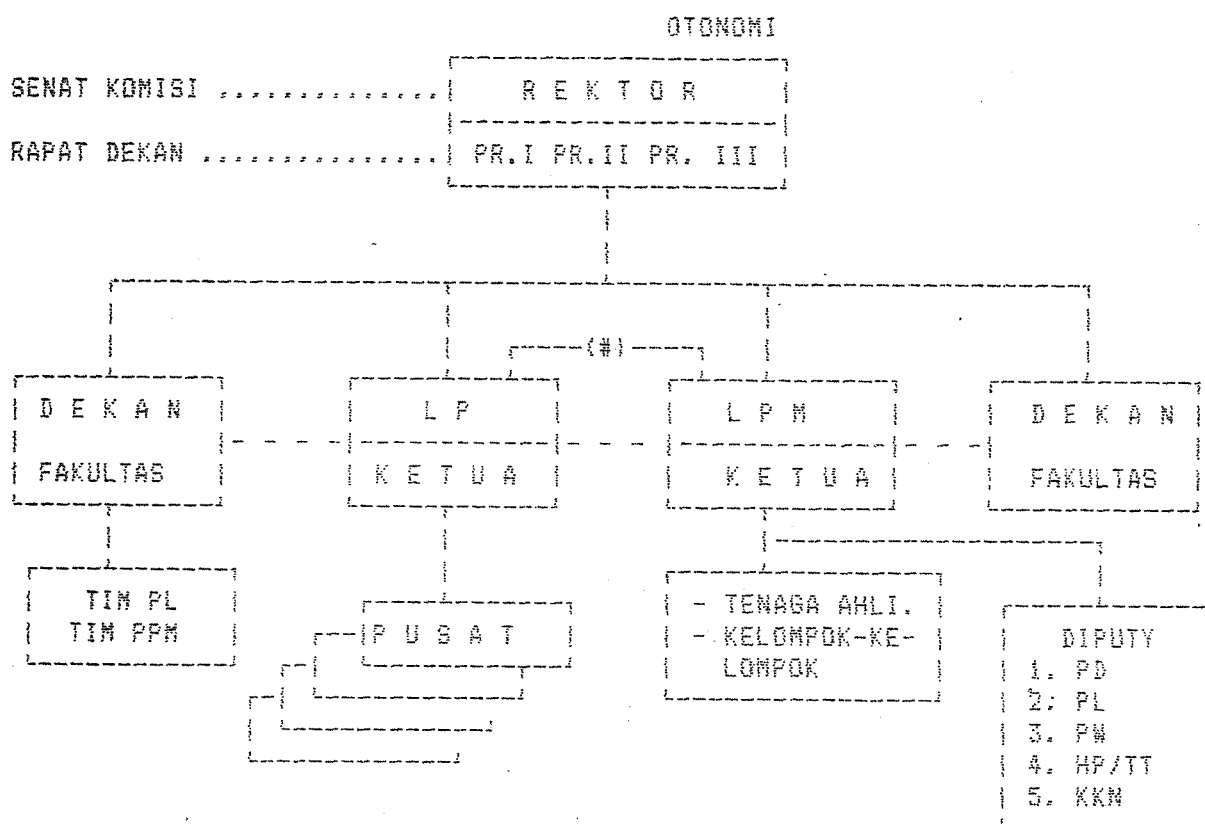
Dr. Ir. Sjafri Mangkuprawira (IPB)	Ketua
Drh. A. Gani Siregar, MS. (IPB)	Sekretaris
Prof. Dr. Ir. Sofyan Asnawi (UNAND)	Anggota
Prof. Dr. Bahrein T. Sugihen (UNSVIAH)	Anggota
Prof. Dr. Wahyu Karhiwikarta (UNPAD)	Anggota
Dr. Djudju Sudjana, M.Ed. (IKIP BDG)	Anggota
Ir. Nisyahuri (UNDIP)	Anggota
Drs. Jonihanto Wasimun, MS. (UNLAM)	Anggota

Lampiran 1. BEBERAPA ALTERNATIF BENTUK STRUKTUR ORGANISASI
LEMBAGA PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

1.1. Usulan Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin



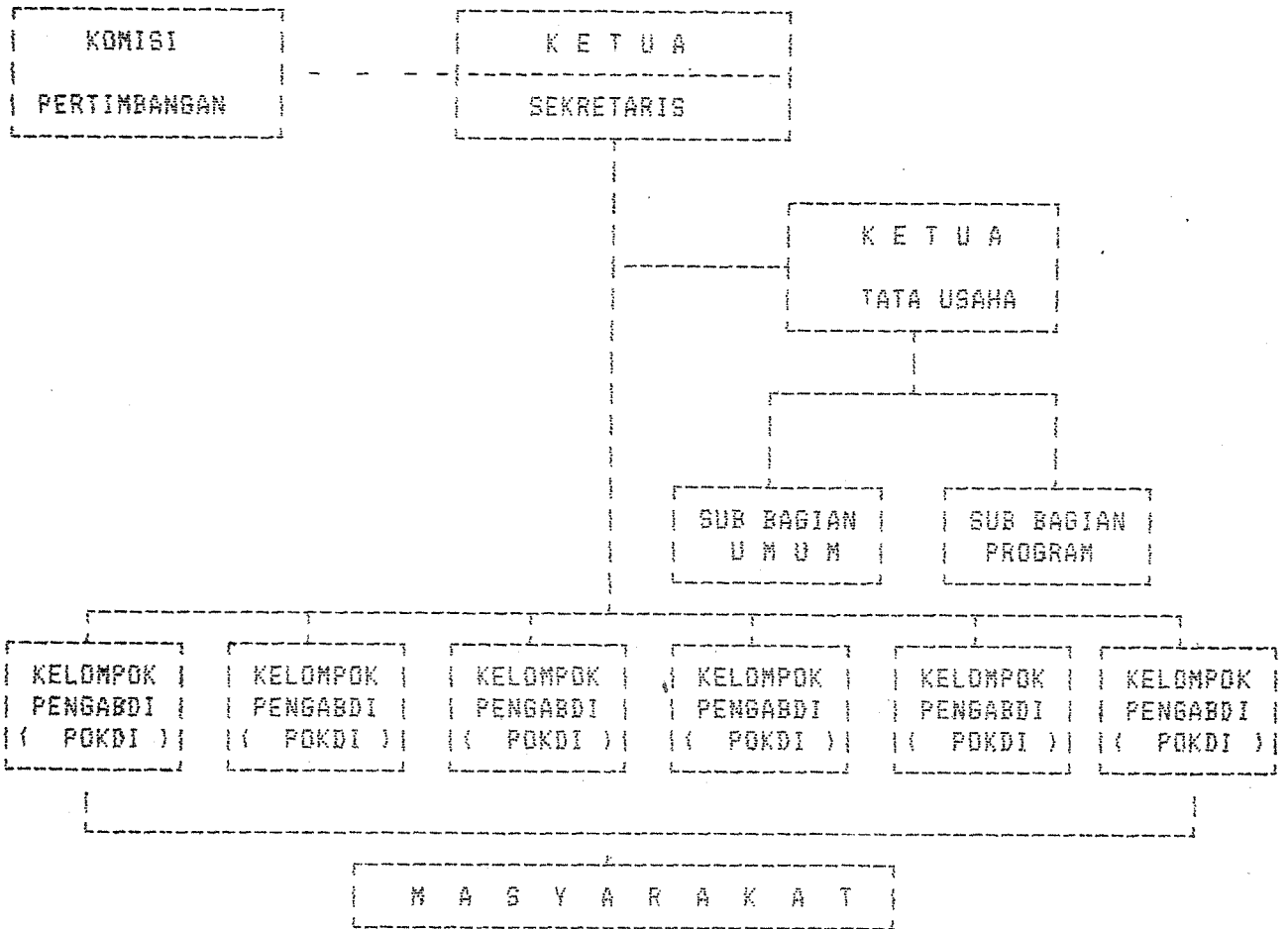
1.3. Usulan Universitas Pajajaran Bandung



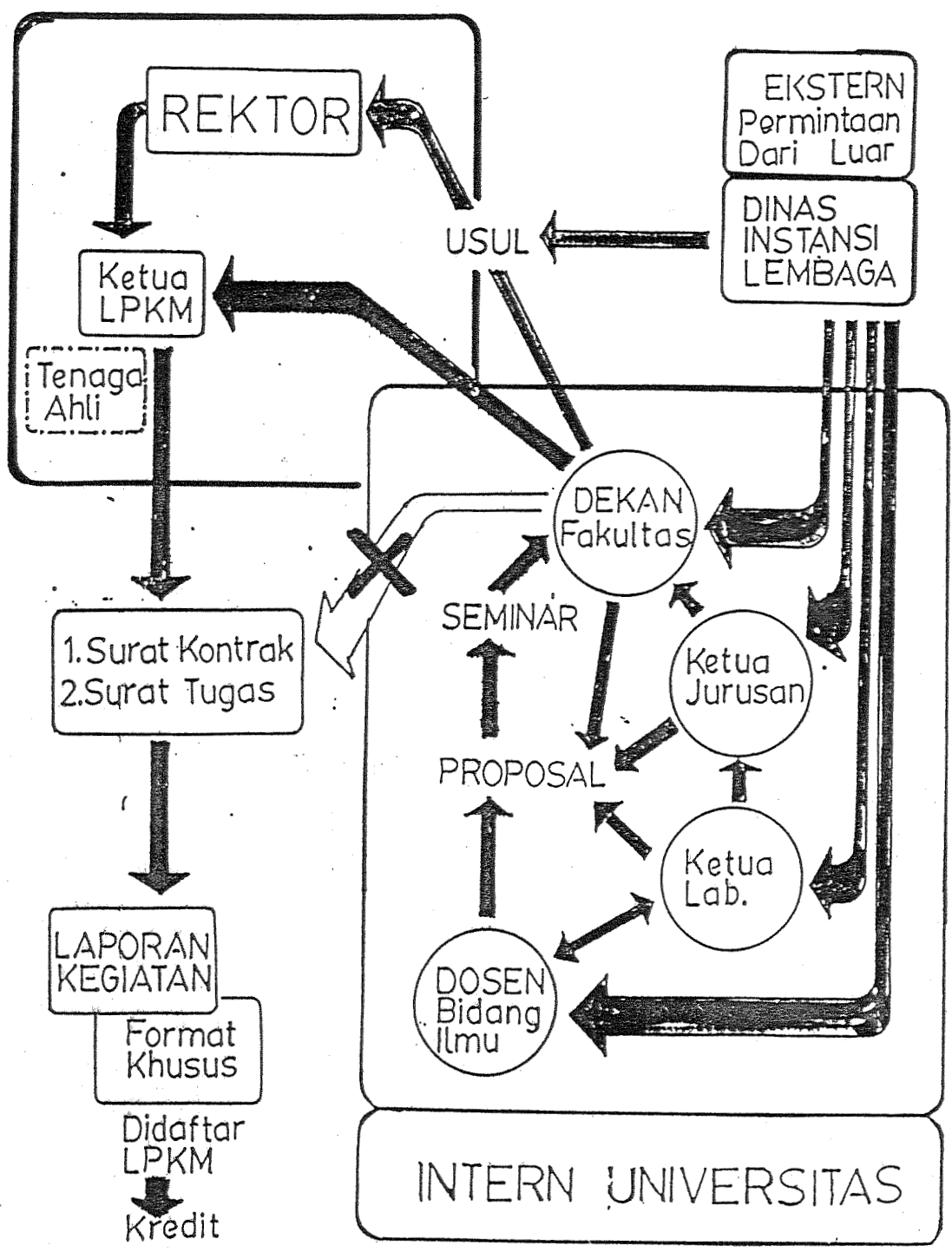
Datatan : (#) Dapat dibentuk Komisi Pertimbangan pada tingkat institut yang memberikan masukan pada LP/LPM.

DIPUTY : PD = Pendidikan; PL = Pelayanan ;
 PW = Pengembangan Wilayah
 HP/TT= Hasil Penelitian/Teknologi Tepatguna
 KKN = Kuliah Kerja Nyata

1.4. Usulan Universitas Hasanuddin



1.5. Usulan Universitas Diponegoro



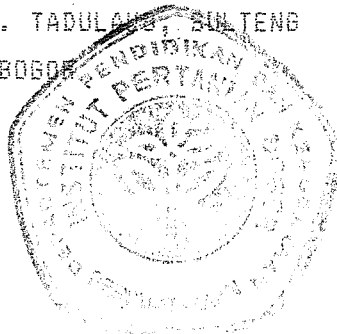
Keterangan:

- alur usulan proposal intern universitas
- alur permintaan dari luar

Lampiran 2.

DAFTAR NAMA PESERTA
SARASEHAN NASIONAL PPM II PERGURUAN TINGGI SE INDONESIA
TANGGAL 2 MARET 1991

NO.	N A M A	ALAMAT/TELEPON	KETERANGAN
1.	PROF.DR.IR. SOFYAN ASNAWI	UNIVERSITAS ANDALAS, PADANG	KETUA PPM
2.	PIET MONIAGA, SH	UNIV. SAMRATULANGI, MANADO	KETUA PPM
3.	PROF.DR. BAHREIN T.SUGIHEN	UNIV. SYAH KUALA, BANDA ACEH	KETUA PPM
4.	DR.H.DJUDJU SUDJANA, M.Ed	IKIP BANDUNG	KETUA LPM
5.	DRS. MAS'UD. HMN	IKIP MUHAMADIYAH JAKARTA	SEKRETARIS LPM
6.	DRS M. HABIB MUSTOPO	IKIP MALANG	KETUA LPM
7.	DR.IR. KAHAR MUSTARI	UNIV. HASANUDIN, UJUNG PANDANG	SEKRETARIS LPM
8.	IR. NISYAMHURI	UNIV. DIPONEGORO, SEMARANG	KETUA LPM
9.	EDDY TOEGIYONO, AS.SH.SU	UNIV. TANJUNGPURA, PONTIANAK	KEPALA LPM
10.	DRS. JONIHANTO WASIMUN, MS	UNIV. LAMBUNG MANGKURAT BANJARMASIN,	KEPALA PPM
11.	DRS. TUMBO SARANANI	UNIV. HALUOLEO, KENDARI	KA. BALAI PPM
12.	DRS. ASEP CHAHYANTO	UNIV. SILIWANGI	SEKRETARIS LPM
13.	BAGUS KETUT LODJI	KOPERTIS WILAYAH VIII DENPASAR TIMUR	SEKR. KOPERTIS
14.	DR. MUCHIDIN APANDI, MSc	UNIV. BANDUNG RAYA	-
15.	DR. DJUHARI	KOPERTIS WILAYAH VI SEMARANG	SEKRETARIS
16.	DRS. YAHYA SENAMAT, BST, MED	UNIV. FAKUAN	KETUA LPM
17.	IR.DRS.EKO EDY SUSANTO	ITN, MALANG	DOSEN ITN
18.	DR. J. TURANG	IKIP MANADO	KEPALA PPM
19.	DRS. J. RATAG	IKIP MANADO	SEKRETARIS PPM
20.	DR.IR. SAAD NASUHIN	UNIV. SRWIJAYA	KEPALA PPM
21.	DRS. EDY SUNARYO	ISI YOGYAKARTA	KA. BALAI PPM
22.	DR. MUS HULISELAN	UNPATI, AMBON	KAPUS PPM
23.	DRS. H. NURDIN RACHMAN	UNIV. TADULANG, SUNTENG	KA. BALAI PPM
24.	DR. IR. H. SJAFRI MANGKUPRAWIRA	IPB BOGOR	KETUA LPM



NO.	N A M A	ALAMAT/TELEPON	KETERANGAN
25.	DRS. SUNANDAR	STP TANJUNGSARI	KA. BALAI PPM
26.	DRS.YUDI AMIYUDIN, MS	KOPERTI WILAYAH IV BANDUNG	KABAG. BINS. KOPERTIS
27.	DRS. UDIS KURNIADI	KOPERTIS WILAYAH IV BANDUNG	SUBAG. PENELI- TIAN DAN PPM
28.	DRS. SUBIYAKTO ATMOSIS- WOYO, MPA	UNIVERSITAS INDONESIA	SEKRETARIS LPM
29.	AFWAN NAJIB, SE.	STIES BANDUNG	-
30.	DR. SADIQ A. KUNTORO, MED.	IKIP JOGYAKARTA	KAPUS PPM
31.	DR.IR. HARIJONO, MApp.Sc	UNIV. BRAWIJAYA	KETUA LPM
32.	DRS. W.J. SUPARDI	UNIV. HANG TUAH SURABAYA	PD I FIA
33.	DRS.WAWAN S.SETIAWAN	UNIV.KRISNADWIPAYANA,BEKASI	-
34.	IR. SULUH KUMORO	ITENAS BANDUNG	-
35.	PROF.DR.WAHYU KARHIWIKARTA	UNPAD BANDUNG	KETUA LPM
36.	IR. I KETUT RIKA	UNIV. UDAYANA	KAPUS PPM
37.	DRS. SUDIJANTA	KOPERTIS WIL. V YOGYAKARTA	
38.	DR. SUNARSO	UNIV. SEBELAS MARET SURAKARTA	KEPALA PPM
39.	DRS.H. HERY AZHAR AZIS, MS	STIE JAKARTA	
40.	PROF.DR.IR. KUNTJORO	LPM IPB	KAPUS PWD
41.	DR.IR. SURDIDING R.,M.SC	LPM IPB	KAPUS P2KKN
42.	DRH. ABDULGANI A.S.,MS	LPM IPB	KAPUS P3M

Lampiran 3.

JADWAL ACARA
SARASEHAN NASIONAL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (PPM) II
DI AULA LPM IPB BOGOR, 2 MARET 1991

No.	W a k t u	A c a r a
1.	08.00 - 09.00	Pendaftaran Peserta
2.	09.00 - 09.45	Pembukaan - Sambutan Ketua LPM - Sambutan Rektor IPB dilanjutkan dengan pembukaan Sarasehan secara resmi
3.	09.45 - 10.00	Ramah tamah
4.	10.00 - 12.00	Penyajian makalah dan Diskusi I: <u>Paper I</u> : <i>Struktur Organisasi dan Mekanisme Kerja Kelembagaan PPM</i> <u>Penyaji</u> : 1. Dr.H. Djudju Sudjana, M.Ed. (Ketua LPM IKIP Bandung) 2. Drs. Yonihanto Wasimun, Ms. (Kapus PPM UNLAM) <u>Moderator</u> : Dr.Ir.H. Sjafri Mangkuprawira
5.	12.00 - 13.00	Istirahat/Makan Siang
6.	13.00 - 15.00	Penyajian makalah dan Diskusi II: <u>Paper II</u> : <i>Program-program Pengabdian pada Masyarakat dalam Kemazuki Jangka Panjang Tahap Kedua</i> <u>Penyaji</u> : 1. Prof. Dr. Bahren T. Sugihan (Kapus PPM UNSYAH) 2. Ir. Nisyamburi (Ketua LPM UNDIP) 3. Prof. Dr. Wahyu Karhiwikarta (Ketua LPM Univ. Pajajaran) <u>Moderator</u> : 1. Prof. Dr. Ir. Sofyan Asnawi
7.	15.00 - 15.30	Istirahat / Perumusan
8.	15.30 - 16.00	Pembacaan Hasil Perumusan dan Penutupan oleh Tim Perumus/Panitia

Lampiran 4.

**SAMBUTAN REKTOR IPB
PADA SARASEHAN NASIONAL PPM KEDUA, PT SE INDONESIA
BOGOR, 2 MARET 1991**

Ass. wr. wbr.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan YME bahwa hari ini kita dapat berkumpul untuk mengikuti acara Serasehan yang penting ini. Dalam kesempatan ini pula, saya ingin mengucapkan selamat datang di Kampus IPB Baranangsiang ini kepada Saudara sekalian, semoga kehadiran sehari di Bogor ini bermanfaat.

Seperti telah kita ketahui bersama bahwa Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1990 baru saja diundangkan dimana kelembagaan PPM masih tetap diakui. Tentunya itu perlu kita syukuri karena kita ketahui bahwa telah banyak suara-suara yang agak bernada sumbang tentang perlu tidaknya kelembagaan PPM ini sewaktu konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Tinggi (cikal bakal PP 30/1990) digodok. Dan Alhamdulillah, berkat usaha kita bersama, khususnya juga karena adanya hasil serasehan yang kita laksanakan pada tahun yang lalu maka kelembagaan dan program Pengabdian Pada Masyarakat tetap diakui.

Saudara-saudara sekalian,

Setelah satu tahapan kita lalui yakni mempertahankan keberadaan kelembagaan PPM maka sekarang kita melangkah lagi untuk membenahi diri dan merencanakan apa yang akan kita lakukan. Untuk itu saya sangat menghargai prakarsa Ketua LPM IPB untuk mengadakan Sarasehan PPM yang kedua ini, di mana akan dibahas dua persoalan penting yaitu :

- 1). Struktur keorganisasian PPM yang dianggap layak bagi Perguruan Tinggi dan
- 2). Mekanisme kerja dan program PPM yang relevan untuk jangka panjang pembangunan tahap ke dua.

Kedua topik ini saya nilai sangat tepat karena disamping membahas segi-segi pengelolaan kelembagaan juga diharapkan dapat dirumuskan arah program PPM di masa yang akan datang.

Untuk itu perlu diingat agar di dalam kita membuat program-program PPM tersebut diperlukan kejelian kita bersama melihat program apa yang memiliki nilai strategis di masa yang akan datang. Dasawarsa mendatang adalah era teknologi informasi. Disamping itu transformasi struktural dalam pembangunan dengan segala tantangannya juga akan terjadi. Karena itu kedudukan PPM saya nilai sangat penting yang diharapkan sebagai perangkat utama Perguruan Tinggi mampu untuk menyebarluaskan dan

menerapkan semua informasi dan teknologi yang perlu untuk masyarakat.

Semua harapan-harapan itu kiranya dapat kita rumuskan pada pertemuan hari ini. Namun demikian mengingat kondisi tiap Perguruan Tinggi di Indonesia relatif masih beragam maka tentunya perumusan struktur organisasi, mekanisme kerja dan program kerja haruslah dilakukan secara realistis dan tidak ambisius.

Akhirnya saya ucapkan selamat berdiskusi, semoga yang kita lakukan hari ini merupakan sumbangan nyata yang dapat kita berikan dalam pembangunan Pendidikan Tinggi di Indonesia.

Dengan mengucapkan Bismillahirohmannirrohim, Serasehan Nasional Pengabdian pada Masyarakat Perguruan Tinggi se-Indonesia yang Kedua ini secara resmi dibuka. Semoga Tuhan YME selalu memberikan rahmatNYA kepada kita, Amin.

Sekian dan terima kasih.
Assalamua'laikum Wr.Wb.

Rektor

Prof.Dr.Ir.H. SITANALA ARSYAD

.Lampiran 5

TOPIK-TOPIK MAKALAH

**STRUKTUR ORGANISASI DAN MEKANISME KERJA
KELEMBAGAAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT**

&

**PROGRAM-PROGRAM PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
DALAM MEMASUKI JANGKA PANJANG PEMBANGUNAN TAHAP II**